

PENGARUH MEDIA SOSIAL TERHADAP SISTEM POLITIK IDENTITAS**Nasir¹, Kahar Gani², Agustan³, dan Sakral Wijaya Saputra⁴**^{1,2,3,4}**Universitas Pancasakti**¹Email: nasirsaja113@gmail.com²Email: ganikahar5@gmail.com³Email: agustanagustan@unpacti.ac.id⁴Email: sakralwijayasaputra5@gmail.com**Abstrak**

Jurnal yang membahas tentang identitas politik banyak yang ikut serta dalam agama dan sekelompok marginal walaupun juga banyak terdapat masalah identitas politik dan etnis yang memiliki tekanan yang lebih pada identitas politik. Pada era reformasi, terdapat partisipasi publik yang semakin meluas dan bebas, di dalam penguatan identitas politik terdapat masalah baru yang hadir. Identitas politik di Indonesia menjadi lebih kuat dan menjadi pilar atas bergulirnya demokratisasi. Setelah selesai mengkaji dan juga menganalisis data, maka dari itu jurnal ini telah berhasil dalam mendapatkan hal-hal yang saling berkesinambungan dengan adanya penguatan dalam identitas politik dan etnis di Indonesia setelah adanya periode baru yang kontribusi antara beberapa pihak memiliki pengaruh, yang terdiri dari kekuatan modal sosial yang telah dimiliki etnis. Di lihat secara eksklusif dalam mendapatkan suatu tempat yang strategis dalam suatu politik baik formal ataupun secara tidak formal.

Kata Kunci: Demokrasi, Politik, Agama, Sosial, dan Etnis**Abstrack**

Many journals that discuss political identity are involved in religion and marginalized groups, although there are also many issues of political and ethnic identity which have more emphasis on political identity. In the reform era, there was public participation which was increasingly widespread and free, in strengthening political identity there were new problems that were present. Political identity in Indonesia has become stronger and has become a pillar of democratization. After finishing reviewing and also analyzing data, therefore this journal has succeeded in getting things that are mutually sustainable with the reinforcement of political and ethnic identities in Indonesia after a new period where contributions between several parties have influence, consisting of capital strength ethnicity already owned. Viewed exclusively in obtaining a strategic place in a political either formally or informally.

Keywords: Democracy, Politics, Religion, Social, and Ethnic

PENDAHULUAN

Latar belakang

Indonesia masuk dalam Negara yang sudah merdeka dan wilayahnya yang sangat luas, sudah dipastikan memiliki identitas agar dapat dikenal dan menjadi pembeda dengan Negara lain. Identitas nasional bisa menjaga kelangsungan dan eksistensi hidup suatu Negara. Maka Indonesia memiliki wibawa dan kehormatan selaku Negara yang setara dengan Negara lain. Identitas nasional digunakan Indonesia sebagai jati diri Negara dari proses kebangsaan yang cukup panjang yaitu semenjak terjadinya masa penjajahan hingga sampai pada masa kemerdekaan. Tetapi karena adanya perubahan ekonomi, sosial, budaya dan politik yang inhere dalam melakukan perjalanan sejarah untuk menjadi bangsa, dimana tidak mungkin akan terlepas dari konteks berubahnya global dalam perkembangan internasional. Dimana perubahan global ini dilihat dari fukuyama akan dibawa ke perubahan ke ideologi particular kearah ideology universal, dan kondisi inilah kapitalis akan menguasainya.

Untuk menghadapi adanya perubahan ini sangat bergantung terhadap kemampuan Negara untuk melawannya. Dalam Satu Negara untuk melawan pengaruh dari budaya asing akan ada *responded an challenge*. Apabila *challence* memiliki nilai lebih besar dari response bisa dikatakan bangsa tersebut tidak akan mengalami perkembangan dan tidak menjadi Negara kreatif. Maka dari itu agar Negara Indonesia masih tetap ada untuk melawan adanya globalisasi harus tetap membawa kejunjangan tinggi tentang identitas nasional dimana menjadi kepribadian Negara Indonesia yang menjadi dasar perkembangan kreativitas budaya yang globalisasi.

Satu Negara akan memerlukan identitas nasional ataupun jati diri yang berfungsi sebagai penanda dan pengenal karakter dari Negara tersebut ke Negara yang lain. Satu Negara juga bisa disebut sebagai Negara apabila telah melaksanakan satu identitas nasional atau melakukan pencarian jati diri Negara, karena dengan adanya Negara lain mengakui bahwa setiap Negara di dunia ini mempunyai identitas sendiri yang sesuai dengan sifat, ciri-ciri, keuntungan dan memiliki ciri khas dari suatu Negara. Penentuan identitas nasional Negara Indonesia, apabila hanya menyebutkan ciri khas fisik saja sangatlah sulit. Diketahui bahwa bangsa Indonesia ini memiliki beranekaragam unsur budaya, ras, dan agama

juga memiliki kepribadian yang dari awal memiliki beberapa perbedaan.

Cara yang digunakan Untuk mendapatkan pengetahuan tentang identitas nasional serta karakter Negara Indonesia tidak banyak di fahami melalui cara statis tetapi harus memahami juga memlalui pembahasan dinamis. Identitas nasional tidak hanya terdapat pada undang - undang dasar 1945 tetapi termasuk juga kedalam undang-undang nomor 24 tahun 2009, harus lebih mendalam melalui filosofis yang menjadi pembeda Negara Indonesia dan Negara lainnya (Tatu Afifah, 2018. 188). Politik identitas yang didasarkan pada kesamaan identitas seringkali menjadi penyebab utama munculnya konflik politik terutama berkaitan dengan ketegangan antara kelompok superior dan inferior ataupun antara mayoritas dengan minoritas. Tidak terkecuali di Indonesia, pemahaan mengenai demokrasi liberal yang mengagungkan pancasila di atas segalanya menjadikan agama sebagai substansi yang keberadaannya dianggap sebagai ancaman bagi keragaman yang ada di Indonesia terutama terhadap agama minoritas (Yeni Sri Lestari, 2018).

Hal positif yang dapat diambil dari politik identitas adalah ada upaya untuk tetap melestarikan nilai budaya yang menjadi ciri khas kelompok yang bersangkutan, sehingga penguatan akan budaya tidak akan luntur dan hilang (Muhammad Habibi, 2018). Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta kehidupan multikulturalisme di Indonesia, maka identitas nasional, etnis, dan agama memainkan peran yang sangat penting (Tutut Chusniyah, 2016). Era politik kontemporer saat ini, politik identitas mengancam sikap nasionalisme dan pluralisme yakni sebuah realitas kegamaan yang dialami bangsa Indonesia terkait menguatnya politik identitas (Zahrotunnimah, 2018). Pembentukan identitas dapat terbentuk baik secara parsial maupun secara interaksial. Hal ini yang akan dapat melahirkan perubahan sosial ekonomi, sosial politik, sosial itu sendiri dan sosial budaya. Identitas etnis dan agama adalah dua hal yang menjadi elemen perubahan sosial.

Proses terjadinya politik identitas keagamaan akan melahirkan dampak langsung maupun tidak langsung pada perubahan sosial begitupun sebaliknya (Sukamto, 2010).

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh media sosial terhadap sistem politik identitas?
2. Sejauh mana proses berjalannya sistem politik identitas yang dilakukan melalui media sosial sehingga memberikan dampak yang luas terhadap aktivitas-aktivitas politik?

Tujuan penulisan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh media sosial terhadap sistem politik identitas.
2. Untuk mengetahui proses berjalannya sistem politik identitas yang dilakukan melalui media sosial sehingga memberikan dampak yang luas terhadap aktivitas-aktivitas politik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Melalui metode library research. Data-data dalam penelitian ini diambil dari sumber kedua, yaitu sumber buku-buku, ebook, jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel, dan opini media cetak lokal yang ada di Indonesia yang diambil melalui website dan sumber dokumen tertulis lain yang bisa dijadikan sebagai sumber informasi dan data untuk bisa dianalisis dalam penelitian ini. Penelitian ini juga menggunakan sumber tertulis lain, yaitu sumber yang bukan dari internet tetapi sumber tersebut terkait dengan masalah penelitian. Media cetak, website, dan sumber dokumen tertulis lain dianalisis melalui pendekatan konten analisis data yang kemudian ditarik kesimpulan dari data tersebut. Penelitian ini juga merupakan penelitian kepustakaan, dimana sumber data yang digunakan meliputi sumber kepustakaan, dokumen, dan informasi. Sumber penelitian ini adalah pengaruh media sosial terhadap keadaan politik identitas saat ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sistem Demokrasi

Sistem demokrasi semakin mengalami peningkatan yang cukup drastis karena dimaklumi dari berbagai pihak pemerintahan di Indonesia, justru kenyataannya pemerintahan tidak selalu memberikan keadilan pada masyarakat. Dalam hal ini digunakan untuk

menjadi penjamin hak yang seharusnya dimiliki warga Negara, jadi setiap individu memiliki kebebasan didalamnya. Pada dasarnya Indonesia terus bertahan dengan perbedaan tentang keanekaragaman yang dapat mengakibatkan suatu kelompok mengalami perpecahan.

Faktor utama yang menjadi pemicu konflik keragaman di Indonesia seperti konflik antar etnis, konflik budaya, dan konflik antar keyakinan. Konflik tersebut memicu timbulnya konflik antara individu dengan individu yang lainnya. Pemicu tersebut bertambah rumit setelah datangnya suatu kelompok yang mengatas namakan nasionalisme sebagai anggapan rasa toleransi atas kemerdekaan yang di raih oleh Indonesia. Identitas etnik, ras, keyakinan, dan adat istiadat yang di dominasi oleh kelompok nasionalis.

Perselisihan yang terjadi antara nasionalis dan keyakinan semakin mengganggu kesetabilan Negara. Perbedaan pemahaman antar kelompok mengenai identitas politik dapat melahirkan isu baru di kalangan masyarakat, yang di sebabkan hadirnya persuasi dan tuntutan antar kelompok terhadap kebenaran identitas yang mereka yakni dengan munculnya kelompok pro pemerintah dan kelompok anti pemerintah. (Yeni sri lestari, 2018. 20-21).

Sejarah Politik Identitas dan Nasionalisme Di Indonesia

Salah satu yang menarik terkait politik identitas dan nasionalisme, memberikan pencerahan terkait suatu sejarah politik identitas dan nasionalisme yang berada di Indonesia. Politik identitas dan nasionalisme begitu mendapatkan ruang sangat istimewa dalam beberapa tahun. Baik dalam praktik atau studi keilmuan di bidang politik dan sosiologis. Salah satunya adalah bahwa di dalam studi pasca kolonial, pada dasarnya politik identitas dan sosiologis sudah ada atau di geluti sejak lama. Kontribusi dalam hal ini yaitu telah meletakkan politik identitas sebagai ciptaan dalam wacana sejarah dan budayanya. Sedangkan dalam literatur ilmu politik, politik identitas betul betul di pilah untuk membedakan dan memperlihatkan perbedaan yang sangat jelas mengenai apa itu politik identitas dan apa itu identitas politik. Identitas politik sendiri merupakan suatu kontribusi yang menentukan posisi kepentingan subjek.

Sedangkan politik identitas merupakan suatu yang mengacu pada mekanisme politik, pengorganisasian identitas, baik dalam identitas politik maupun identitas sosial. Politik identitas di pahami bahwa dalam pertarungan perebutan kekuasaan politik kian terlihat dalam praktik politik mengalami kemajuan. Apalagi menjelang pesta demokrasi akbar yang dilaksanakan pada tahun 2019 di Indonesia melalui agenda besar bernama PEMILU. Salah satu pakar politik yang bernama Donald L Morowitz (1998) merupakan salah satu pakar politik berasal dari Universitas Duke telah mendefinisikan politik identitas sebagai pemberian garis yang sangat tegas untuk menentukan siapa saja yang akan di ikut sertakan dan siapa yang akan di tolak. Suatu garis penentuan tersebut tidak bisa di rubah maka setatus baik sebagai anggota maupun terlihat bersifat permanen. Agnes Heller (Abdillah, 2002:22) menggambarkan terkait politik identitas dalam hal ini yang di fokuskan pada suatu pembedaan, dimana suatu kategori utamanya adalah menjanjikan kebebasan, toleransi, dan kebebasan bermainwalau akhirnya memunculkan pola-pola intoleransi, kekerasan dan pertentangan etis. Sehingga pada akhirnya politik identitas dapat mencakup rasisme, bio-feminisme, politik isu lingkungan, dan perselisihan etnis Nasionalisme muncul sebagai akibat dari banyaknya tanggapan terhadap industrialisasi keterceraian orang-orang dan rupa-rupa ikatan primordial kepada kekerabatan, agama dan komunitas lokal.

Dalam catatan suatu sejarah Indonesia dikatakan, bahwasanya peran ideology nasionalisme dalam politik di Indonesia sendiri di mulai oleh sekelompok pemuda yang tergabung dalam organisasi budi utomo. (Zahrotunnimah, 2018. 93) Politik identitas di Indonesia sebagian di kutip dalam bukunya politik identitas dan masa depan pluralism Indonesia , di jelaskan bahwa kasus di Indonesia politik identitas lebih terkait dengan etitas, agama ideology dan kepentingan kepentingan lokal yang di wakili pada umumnya oleh para elit politik dengan artikulasi masing-masing. Tentu sangat berbeda pemahaman sejarah nasionalisme di Indonesia dahulu, yang awal mulanya merupakan sebuah ideology, sebgai bentuk perlawanan terhadap kolonialisme yang di mulai dengan penerbitan Koran medan prijaji milik pengusaha pers dan jurnalis pribumi pertama R.M. Oleh karena itu, jika di amati atau di lacak dari sejarah Indonesia

politik identitas yang muncul cenderung bermuatan entitas, agama dan ideology politik. Dengan kondidisi Indonesia yang multikulturalisme, maka politik identitas dapat menjadi bahan kajian yang dapat di telaah.

Politik Identitas dan Penguat Demokrasi Lokal

Budaya politik lokal yang sekarang berkembang di Indonesia merupakan warisan sosial yang sudah terbentuk sejak berjalanya sejarah di Indonesia. Budaya terbentuk dari beberapa bagian yaitu kepercayaan, kebiasaan, dan struktur soaial yang berkesinam bungan dengan kehidupan politik masyarakat. Adapun batasan terdapat dalam budaya tersebut dapat berasal dari agama, adat istiadat dan juga norma-norma yang sudah berlaku di masyarakat. Budaya tersebut juga dapat dilihat dari condongnya perilaku masyarakat pada kehidupan politik di dalam masyarakat tersebut. Budaya politik lokal yang berkembang di Indonesia juga memiliki tanggapan adanya tekanan sosial, politik, dan ekonomi masyarakat. Budaya tersebut mendapat pengaruh dari sistem kultural dan kepercayaan atau agama. Dengan berkembangnya sekelompok komuitas tradisional pada budaya tersebut didalamnya terdapat nilai-nilai positif yang cocok dikembangkan dan dapat dipertahankan dalam pengelolaan sistem birokrasi lokal di daerah.

Pada sistem politik juga akan memberi pengaruh kebudayaan pada setiap daerah, dan berpengaruh juga terhadap bagaimana pola birokrasi yang telah dilaksanakan dan sistem demokrasi, Sistem demokrasi lokal merupakan gambaran bagi budaya politik suatu daerah, dan juga menjadi aspek paling penting karena sistem birokrasi berpengaruh pada seluruh bidang kehidupan politik di masyarakat. Budaya demokrasi tersebut memiliki hubungan antara budaya politik lokal yang kuat, pertama birokrasi merupakan badan politik, yang ke dua budaya demokrasi mempunyai peranan penting dalam upaya memahami golongan atas dalam politik. Yang ketiga keberhasilan merupakan pembangunan daerah yang dipengaruhi oleh peranan sistem birokrasi yang dijalankan setempat. Beberapa dalih yang utarakan oleh para informan terkait ada tidaknya suatu tindakan lokal yang dapat mengubah suatu sistem politik lokal, beberapa anggapan melihat bahwa nilai lokal yang masih banyak di gunakan oleh masyarakat. Namun mereka tidak

belum percaya atau masih meragukan hal tersebut yang di dasari dengan anggapan bahwa sistem politik yang di gunakan saat ini sudah melupakan hal- hal yang bersifat lokal, seperti tata kelola dan penyelesaian masalah dalam politik lokal.

Adanya banyak rasa kurang percaya terhadap golongan atas terhadap politik lokal yang masih menjual berita-berita nilai yang lokal guna untuk mendapatkan belas kasih dari warga lokal, di beberapa daerah masih kuat unsur-unsur nilai yang tinggi yang masih kental di kalangan masyarakat. Kesimpulan dapat di ambil bagaimana nilai lokal keutamaan yang sangat memungkinkan suatu perubahan dalam suatu sistem politik. Dampak yang besar dapat mempengaruhi suatu sistem birokrasi yang berada di suatu daerah. sehingga tidak bisa di hindarkan ketika budaya birokrasi dan budaya politik di setiap daerah itu berbeda tergantung perkembangan budaya politik .berdampak pada pola pikir elit lokal. Yang di percayai oleh masyarakat lokal adalah nilai-nilai kultural, juga sangat berakibat pada pola pikir kelompok atas yang lokal. Ada kejadian di beberapa daerah bahwa melihat penguatan politik identitas di ranah lokal dapat merubah suatu sistem politik.

Habodin, Muhtar (2012), memberikan suatu gambaran di beberapa daerah dengan adanya berita lokalisme dapat mengakibatkan menggiyangnya kesetabilan pemerintah. Dengan adanya berita putra daerah yang harus memimpin dalam suatu daerah membuat beberapa perubahan dalam pemerintahan. Di masa orde baru kepemimpinan di pimpin oleh putra daerah semua di kuasai dan di tentukan oleh pusat, adapun pergerakan yang di lakukan oleh pra kelompok atas lokal.

Adapun tingkat kesenjangan masyarakat relatif rendah. Bahwa dalam arena pertarungan tidak dapat di pungkiri lagi seperti Indonesia yang saling beradu domba, berlomba untuk mendapatkan apa yang di inginkan. Kelompok atas tentu memanfaatkan situasi ini dimana yang turut menikmati yaitu masyarakat kelas ke bawah, masyarakat berpartisipasi dalam politik yang di gerakkan oleh uang dan menjadi demokrasi Indonesia sebuah rimba politik. Di sini yang banyak uang dialah yang paling menang. Tetapi hal tersebut tidak bisa menjadi jaminan bagi kemajuan bangsa kedepannya.

Feodalisme di Indonesia digunakan merujuk pada perilaku yang kurang baik sama dengan perilaku yang kolot, di mana mereka

selalu ingin di hormati kemudian bertahan dalam nilai norma yang telah lama di tinggalkan. Dengan adanya feodalisme menjadikan masalah enggan untuk mengeluarkan pendapat dan mungkin pemikiran yang berbeda apa lagi bertentangan dengan pemikiran orang yang di anggap lebih tinggi jabatannya atau kedudukannya. sebaliknya orang begitu mengabaikan terhadap orang yang di anggap mempunyai posisi yang di nilai lebih rendah dari pada posisinya sendiri. Yang menempati grafik puncak peringkat pola kepemimpinan di Indonesia yakni structural maupun kultural. Di mana structural dan kultural memposisikan hubungan secara vertikal antara sesama manusia. Sikap putus asa dan skeptic terhadap demokrasi. Penganut teori konspirasi memandang apapun yang ada di dunia ini sudah dirancang sedemikian rupa dan masyarakat dunia menjadi korban atas sekenario besar. Demokrasi yang yang di anggap menjadi sekenario yang di tawarkan. Masyarakat barat berpendapat yang melahirkan demokrasi mempunyai budaya berbeda budaya Indonesia, bahwa budaya berpengaruh terhadap pelaksanaan demokrasi yang benar. Setiap budaya dapat dikembangkan oleh demokrasi, kemudian demokrasi tidak akan persis sama dalam lingkungan budaya yang berbeda.

Contohnya demokrasi di jepang dan amerika sangat berbeda, jangankan antara budaya barat dan timur demokrasi di inggris dan perancis saja berbeda. Diidentikan bahwa politik praktis memilih kepala daerah yang secara langsung , pemilihan yang di lakukan secara langsung dapat menimbulkan banyak efek, saat itu jalan yang paling baik untuk reprensi masyarakat. Kepala daerah dan wakil kepala daerah di pilih langsung oleh DPRD. Penyelenggaraan hukum pilkada dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yaitu tentang pemerintahan daerah. Pemilu di selenggarakan memilih wakil rakyat parlemen ataupun pemimpin eksekutif tingkat nasional dan lokal seperti presiden dan gubernur. Praktis politik dilakukan oleh setiap politisi yang memberikan kesan yang beragam terhadap masyarakat, janji yang diberikan oleh politis beragam yang mendapat balas kasian dari masyarakat dan mendapatkan apresiasi di tengah-tengah masyarakat. Dalam penyelenggaraan pemilu harus betul di awasi semua pihak, dan harapan terselenggarakan dengan bebas, rahasia, jujur, dan adil. Selain itu pemilu juga harus di selenggarakan dengan taat pada asas kepastian hukum, tertip

penyelenggaraan pemilu, kepentingan umum, keterbukaan efisiensi, dan efektivitas. Masyarakat mempertimbangkan dalam pemilihan calon pemimpin dengan pertimbangan orang tersebut memiliki perhatian jelas kepada konstituenya tentang perhatian mereka terhadap pemberdayaan orang dan nilai lokal dalam satu acuan dalam memilih, hal tersebut merupakan hal yang wajar dalam memilih menjadi wakil mereka di pemerintahan. Responden mempercayai banyak alasan eksekutif maupun legislative (M. Sirajudin fikri, Nico Oktario A, 2018. 173- 17).

Kebangkitan Politik Identitas Islam

Pendekatan pertama, adanya argumentasi primordialisme untuk melihat fenomena agama yang terdapat di dalam kategori sosio-biologis. Dalam pandangan ini di jelaskan bahwa suatu kelompok sosial dikarakteristikkan oleh wilayah, agama, kebudayaan, bahasa dan organisasi sosial sebagai hal yang tidak bisa di bantah. Sedangkan secara konseptual, pandangan ini menekankan kehadiran identitas etnik dan agama primordial memiliki fungsi sebagai perekat sebuah komunitas. Secara definitif para penganut paham primordialisme menekankan pada upaya pencapaian kepentingan yang kolektif untuk di jadikan definisi dan mengartikulasi pandangan secara umum sekaligus untuk membentuk visi untuk masa depan. Pendekatan konstruktifis yang di kembangkan oleh frederik barth. Suatu teori yang memandang suatu identitas agama dan budaya, sebagai hasil dari proses yang kompleks, dan batas-batas yang sangat simbolik kemudian dibangun oleh manfaat mitologi yang situasi kondisi dan tujuan yang ingin di capai. (Endang sari, 2016. 149).

Persaingan Identitas Ekonomi-Politik, Agama dan Etnis

Dalam permasalahan demokrasi harus memperhatikan beberapa faktor yang memiliki keterkaitan dengan faktor ekonomi yang ikut mempengaruhi berjalanya demokrasi di Indonesia. Berdasarkan sejarah nusantara agama islam menjadi mayoritas yang diyakini penduduk Indonesia yang dibawa oleh pedagang arab pada tujuh masehi setelah Indonesia dikuasai india di abad pertama masehi. Kedatangan pedagang india dan arab ke Indonesia yang menjadi pemicu pertama padatnya penduduk di Indonesia dan sampai saat ini semakin berkembang. Pada masa penjajahan pedagang tionghoa, india dan arab mempunyai peran besar dalam perdagangan di

Indonesia, dan yang paling utama terletak di Batavia. Alasan orang cina datang dan menetap di Indonesia untuk menjadi buruh dan pekerja yang di pimpin oleh VOC dan Inggris, lalu orang cina di angkat sttus sosialnya sederajat dengan orang india dan arab oleh belanda yang menjadi penghubung perdagangan dengan Indonesia. Wilayah yang menjadi Pusat perdagangan dan perekonomian para imigran yaitu Jakarta. Wilayah di Indonesia sebagian diduduki oleh keturunan orang cina, dan diikuti oleh keturunan arab dan india. Keturunan cina dan arab sudah memiliki wilayah sendiri di Jakarta. Kawasan wilayah tersebut di beri nama pecinan. Wilayah yang dipercayai oleh cina untuk ditempati sebagai jalur naga mulai dari Kepala Gading, Sunter, Keramat, Luar Batang, dan Pluit di Jakarta Utara, sampai di Glodok, dan di Jakarta Barat. Bangsa arab mempunyai wilayah sendiri yang terdapat di Condet Jakarta Timur dan Negara India banyak menempati rumah susun Bandar kemayoran Jakarta pusat sebagai tempat tinggal.

Dari segi pendidikan orang Indonesia memilih alasan yang lebih rasional mendidik dan kritis. Untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya 45- 50% berpendidikan SLTA dan wilayah sekitar berjumlah 20-25% berpendidikan perguruan tinggi. Survei yang sudah diterbitkan ke public relatif menandakan bahwa faktor suku dan agama tak terlalu berpengaruh. Identitas suku dan agama yang paling utama adalah faktor yang bersifat latin, dan itu semua ada pada masyarakat terutama masyarakat multi kultur seperti Jakarta. Digunakan atau tidak dan berpengaruh atau tidak tergantung pada sejumlah kondisi. (Hanifiya, 2018. 40-44).

Politisme Agama Sebagai Sebuah Fenomena Politik Pasca-Kebenaran: Antara Populisme, Distorsi, Informasi, dan Legitimasi

Pada realitas populistik tidak mungkin jauh dari era pascakebenaran. Pembahasan yang dibuat dalam kompetisi politik digambarkan adanya berita-berita tentang menjunjung tinggi hak masyarakat. Jansen (2015) berpendapat bahwa perilaku individu yang menjunjung tinggi hak adalah integritas politik didalamnya ada tokoh tokoh politik dapat mengarahkan integritas sosial yang tersisihkan lalu menciptakan integritas yang bisa secara giat melaksanakan praktik politik benar adanya dan perdebatan.

Dalam hal ini komponen penting yang menjunjung tinggi yaitu mengarahkan dan terkait. Menjunjung tinggi hak memiliki ciri yang bertabiat normal. Yang pertama yaitu kemampuan yang memiliki arti keadaan yang mewakili dari integritas dapat meninggikan, yang kedua adalah ada tokoh yang mempunyai kekuasaan, lalu yang ketiga rasa integritas sosial sangat kuat, bisa diketahui melalui kondisi dimana yang seringkali diajukan beberapa pelaku yang berfungsi sebagai 'kita dan mereka' dimana ada batasan suatu integrasi dengan integrasi lainnya, integrasi disini memiliki tabiat yang menghasilkan perbedaan. Berita tentang menjunjung tinggi hak yaitu berita yang sama dengan keperluan masyarakat umum. Berita tersebut bukan hanya berita yang dipahami oleh kalangan sosial tertentu saja. Berita tentang menjunjung tinggi hak sering kali mengungkap berita yang menyangkut keinginan hidup individu banyak. Dengan adanya hal tersebut maka, berita menjunjung tinggi hak sangat mudah mencapai pengertian dan juga selisih massa dari masyarakat umum. Berfungsi sebagai eksemplar, yang dinamakan gerakan 2019 ganti Presiden ydimana menjadi gerakan yang awal mulanya dibangun sebagai wake up call dan peringatan utama tentang "kisruhnya" pemerintahan pada saat ini.

Salah satu pembuat gerakan ini yaitu Mardani Ali sera mengatakan Wake up call terhadap masyarakat yang beragama muslim di Indonesia supaya tidak berdiam diri saja dalam hal berpolitik menjelang pemilihan presiden tahun 2019. Dengan cara penggunaan kebijakan agama, tidak hanya dokrin-dokrin primer yang ada pada Al-Qur'an ataupun Hadist yang sering kali diambil untuk memperkuat pertahanan kebijakan yang mereka kemukakan. Para pembangun geraka 2019 Ganti Presiden sering memberikan berita-berita yang menjunjung tinggi hak. Fakta-fakta yang diberikan terhadap masyarakat umum biasanya fakta yang kondisinya terpotong- potong dan tidak memiliki keseimbangan. Kondisi 2019 Ganti Presiden secara umum pengembangan agama bukan hanya untuk alat politik, tetapi juga untuk mengeluarkan berita-berita politik yang dimana Indonesia menjadi Negara yang bahaya.

Selain hal tersebut berita tentang hutang Negara, adanya berita yang membuat keadaan bersifat politis yang dimana terdapat fakta persial yang dilihat dari sisi hutangnya saja tetapi sisi yang lain tidak dilihat. Selain berita tentang

tingginya hutang Negara, berita yang membuat keadaan Indonesia bersifat politis yaitu tingginya tingkat tenaga kerja asing yang memiliki pekerjaan diindonesia, padahal jika dilihat dari data statistik surveinya mengatakan bahwa prevalensinya sangat sedikit kemungkinannya jika dibandingkan dengan banyaknya tenaga kerja domestik. Kebijakan presiden dalam mempermudah visa dari tenaga asing dianggap oleh beberapa pihak sebagai bukti presiden berpihak pada tenaga kerja asing. Perbincangan yang diberikan gerakan 2019 Ganti Presiden menuju pada proteksionistik, yang memiliki sifat SARA, dan menghidupkan kembali sistem masyarakat warga Negara dan bukan warga Negara.

Hidupnya kembali pembahasan proteksionis ini sama dengan pembahasan populis Trump dimana hal tersebut menjanjikan bahwa amerika akan bangkit di gunia dengan melaksanakan kebijakan proteksionis dan diskriminatif, dengan cara melaksanakan legitimasi yang cukup subjektif yang mereka anggap sama dengan kepentingan politik mereka.

Tindakan seperti ini merupakan menjadi mentalitas pasca- kebenaran, dimana fakta parsialnya dan opini emosionalnya lebih menonjol dari pada fakta objektifnya (Budi kurniawan, 2018. 145).

Identitas Nasional Sebagai Pertimbangan Politik Indonesia Dalam Merespon Aksi Terorisme

Berita terorisme pada saat ini semakin mengalami perluasan tidak hanya satu Negara tetapi sampai mancan Negara yang membuat penyebaran teroris semakin berkembang pesat lalu menjadi peristiwa global. Penyebab dari peristiwa ini karena adanya masa globalisasi yang mengakibatkan modal, aliran dan para mayarakat mengalami percepatan dalam jaringan teroris. Dalam globalisasi bukan hanya membahas tentang mobilitas barang dan masyarakat saja tetapi membahas tentang pemikiran atau ide baru. Arus globalisasi juga membahas tentang teknologi informasi dan komunikasi yang mengalami perkembangan yang cukup pesat dan mendorong perkumpulan orang bahkan individual untuk mengikuti pemanfaatan keadaan tersebut sesuai dengan kepentingan masing-masing.

Globalisme tidak hanya memberikan kemudahan untuk kebutuhan masyarakat tetapi juga mencetuskan hal yang tidak adil dalam

distributive sehingga kejadian ini digunakan untuk dorongan terhadap tindakan fundamentalisme-terorisme. Adapun faktor-faktor yang menjadi pendorong penyebab munculnya tindakan terorisme ialah agama yang sering kali dijadikan legitimasi perlawanan dengan cara meneror. Meskipun tidak selalu menjadi penyebab utama ada faktor lainnya yang sangatlah penting yang harus dipertanyakan saat melakukan pembahasan berita tentang terorisme. Moduse operandi yang dilakukan mulai mengalami perkembangan pada abad ke-21 diakibatkan karena semakin majunya teknologi elektronik, komunikasi, transportasi dan juga berkembangnya ilmu tentang pengetahuan di bidang kimiawi. Peristiwa yang tragedy 11 September 2001 yang menjadi saksi dimana ada dua pesawat komersial amerika serikat yang menabrak gedung kembar world trade center dan dimana salah satu pesawat yang lain menabrak pentagon, gedung yang menjadi pusat pertahanan Negara amerika serikat tersebut mengakibatkan ribuan warga amerika meninggal dan ada yang luka-luka sehingga public dunia tertarik pada peristiwa ini dan amerika serikat marah. Ada beberapa upaya terhadap peristiwa tersebut penahanan dan pengadilan dilakukan kepada sebagian individu dan kelompok yang ada di Negara-negara asia tenggara termasuk Indonesia atas tuduhan persekongkolan dalam pergerakan terorisme. Hal ini juga membuktikan bahwa kelompok tersebut memiliki hubungan yang rasional antar satu kelompok dan kelompok yang lain dan kelompok-kelompok yang radikal internasional (Hidayat Chusnul Chotimah, 2016. 189-190).

Politik Identitas Terhadap Dinamika Penduduk

Di Indonesia lebih dominan yang berkaitan pada suatu masalah etnisitas, agama, serta ideologi dan pelaku lokal yang berkepentingan melalui perluasan daerah. Berita yang digunakan para pelaku lokal dalam ketidakadilan dalam membangun politik bargaining. Yang di jelaskan pada setiap kesempatan. Akan tetapi target para pelaku lokal telah di anggap hanya menjadi naluri untuk memimpin suatu kelompok demi mencapai tujuan ekonomi, politik. Yang menjelaskan bahwa desentralisasi merupakan faktor penentu munculnya suatu politik identitas dengan besarnya kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat ke daerah di era reformasi membuat mantapnya kedudukan

pelaku lokal atas kekuasaan di arena politik lokal. Praktek politik didesentralisasi mendajikan berita etnisitas, suku, agama, dan golongan sebagai politik dalam meraih kekuasaan. Politik identitas di pengaruhi oleh faktor struktural, dimensi politik utamanya, ketidaksinambungan politik dan etnis.

Menurut suatu wilayah satuan keturunan yang disebut sebagai suku dalam sejarah perkembangan masyarakat berdasarkan keturunan yang di kenal. Pembagian wilayah kekuasaan yang di kontrol oleh belanda memberi kekuasaan antara bukti terhadap penguasaan tanah, pola hubungan sosial yang kemudian diatas namakan kepada kedua masyarakat melalui ungkapan urang ukan. Dalam etnis cenderung dijadikan sebagai legitimasi politik untuk meraih kekuasaan, kelompok yang tergabung secara struktural dimanfaatkan oleh pelaku lokal guna mencapai kekuasaan melalui proses politik yang cenderung memobilisasi jaringan melalui identitas yang diciptakan untuk memenangkan pertarungan. Politik yang mengarah pada etnis cenderung dijadikan sebagai alat oleh pelaku diarena politik untuk mencapai kekuasaan secara struktural dimanfaatkan pelaku lokal guna mencapai kekuasaan melalui identitas etnis serta diciptakan untuk memenangkan pertarungan. Politik identitas dijadikan alat untuk legitimasi politik, ditingkat supra desa.

Politik identitas di supra desa menunjukkan bahwa hubungan kepentingan politik diciptakan oleh pelaku di akuisisi oleh kekuatan modal seperti ekonomi, politik, sosial dan budaya yang meahirkan pelaku politik. Dalam penguasaan aset dan sumberdaya, pembagian kekuasaan, hingga pembangunan pedesaan. Kekuasaan politik di supra desa telah menjadi mekanisme baru pencirian keuntungan bagi pelaku tertentu yang dikenal dengan istilah rent seeking (Saradi watna, dkk, 2018. 80-83).

PENUTUP

Kesimpulan

Sistem demokrasi semakin mengalami peningkatan yang cukup drastis karena dimaklumi dari berbagai pihak pemerintahan di Indonesia, justru kenyataannya pemerintahan tidak selalu memberikan keadilan pada masyarakat. Dalam hal ini digunak untuk menjadi penjamin hak yang seharusnya dimiliki warga Negara, jadi setiap individu memiliki kebebasan didalamnya. Pada dasarnya

Indonesia terus bertahan dengan perbedaan tentang keanekaragaman yang dapat mengakibatkan suatu kelompok mengalami perpecahan.

Salah satu yang menarik terkait politik identitas dan nasionalisme, memberikan pencerahan terkait suatu sejarah politik identitas dan nasionalisme yang berada di Indonesia. Politik identitas dan nasionalisme begitu mendapatkan ruang sangat istimewa dalam beberapa tahun. Baik dalam praktik atau studi keilmuan di bidang politik dan sosiologis. Salah satunya adalah bahwa di dalam studi pasca kolonial, pada dasarnya politik identitas dan sosiologis sudah ada atau di geluti sejak lama. Budaya politik lokal yang sekarang berkembang di Indonesia merupakan warisan sosial yang sudah terbentuk sejak berjalanya sejarah di Indonesia. Budaya terbentuk dari beberapa bagian yaitu kepercayaan, kebiasaan, dan struktur sosial yang berkesinambungan dengan kehidupan politik masyarakat. Adapun batasan terdapat dalam budaya tersebut dapat berasal dari agama, adat istiadat dan juga norma-norma yang sudah berlaku di masyarakat. Budaya tersebut juga dapat dilihat dari condongnya perilaku masyarakat pada kehidupan politik di dalam masyarakat tersebut. Kebangkitan politik identitas Islam melalui beberapa pendekatan.

Pendekatan pertama, adanya argumentasi primordialisme untuk melihat fenomena agama yang terdapat di dalam kategori sosio-biologis. Dalam pandangan ini di jelaskan bahwa suatu kelompok sosial dikarakteristikan oleh wilayah, agama, kebudayaan, bahasa dan organisasi sosial sebagai hal yang tidak bisa di bantah. Sedangkan secara konseptual, pandangan ini menekankan kehadiran identitas etnik dan agama primordial memiliki fungsi sebagai perekat sebuah komunitas. Dalam permasalahan demokrasi harus memperhatikan beberapa faktor yang memiliki keterkaitan dengan faktor ekonomi yang ikut mempengaruhi berjalannya demokrasi di Indonesia. Berdasarkan sejarah nusantara agama islam menjadi mayoritas yang diyakini penduduk Indonesia yang dibawa oleh pedagang arab pada tujuh masehi setelah Indonesia dikuasai india di abad pertama masehi. Kedatangan pedagang india dan arab ke Indonesia yang menjadi pemicu pertama padatnya penduduk di Indonesia dan sampai saat ini semakin berkembang Politisme agama sebagai sebuah fenomena politik pasca-

kebenaran: antara Populisme, Distorsi, informasi, dan legitimasi. Pada realitas populistik tidak mungkin jauh dari era pasca-kebenaran. Pembahasan yang dibuat dalam kompetisi politik digambarkan adanya berita-berita tentang menjunjung tinggi hak masyarakat. Jansen (2015) berpendapat bahwa perilaku individu yang menjunjung tinggi hak adalah integritas politik didalamnya ada tokoh-tokoh politik dapat mengarahkan integritas sosial yang tersisihkan lalu menciptakan integritas yang bisa secara giat melaksanakan praktik politik benar adanya dan perdebatan. Dalam hal ini komponen penting yang menjunjung tinggi yaitu mengarahkan dan terkait. Kebangkitan politik identitas islam pada arena pemilihan gubernur Jakarta Momentum pilkada yang berada di Jakarta telah memperlihatkan beberapa berita yang berkaitan dengan kampanye yang mana kampanye tersebut menguras energi bangsa bukan hanya publik Jakarta akan tetapi juga melibatkan masyarakat Indonesia, diantaranya kasus yang berkaitan dengan surah Al Maidah ayat 51 yaitu pada sebuah organisasi masyarakat di berbagai daerah di Indonesia datang ke Jakarta untuk melakukan aksi demo, karena adanya opini yang mengatakan bahwa 'Saya Muslim, saya memilih pemimpin yang muslim'. Orang muslim pada saat itu menjadi pusat perhatian karena orang muslim memilih pemimpin harus muslim. Orang muslim tersebut akhirnya menjadi salah satu orang yang sedang menjadi tema perbincangan di publik dalam pemilihan gubernur Jakarta yang di umumkan di setiap jumat dan juga pada berbagai kegiatan keagamaan. Akhirnya banyak kalangan yang memberi kesimpulan bahwasanya Indonesia mengalami konflik baru diantaranya negara dan agama, yang utama berkaca pada tingginya politik dalam pemilihan gubernur di Jakarta. Identitas nasional sebagai pertimbangan politik Indonesia dalam merespon aksi terorisisme Berita terorisme pada saat ini semakin mengalami perluasan tidak hanya satu Negara tetapi sampai mancan Negara yang membuat penyebaran teroris semakin berkembang pesat lalu menjadi peristiwa global. Penyebab dari peristiwa ini karena adanya masa globalisasi yang mengakibatkan modal, aliran dan para masyarakat mengalami percepatan dalam jaringan teroris.

Rekomendasi

Dalam globalisasi bukan hanya membahas tentang mobilitas barang dan masyarakat saja tetapi membahas tentang pemikiran atau ide baru. Arus globalisasi juga membahas tentang teknologi informasi dan komunikasi yang mengalami perkembangan yang cukup pesat dan mendorong perkumpulan orang bahkan individual untuk mengikuti pemanfaatan keadaan tersebut sesuai dengan kepentingan masing-masing. Di Indonesia lebih dominan yang berkaitan pada suatu masalah etnisitas, agama, serta ideologi dan pelaku lokal yang berkepentingan melalui perluasan daerah. Berita yang digunakan para pelaku lokal dalam ketidakadilan dalam membangun politik bargaining. Yang di jelaskan pada setiap

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, Tatu. 2018. "Identitas Nasional Ditinjau dari Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang No 24 Tahun 2009". *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 2. Diakses tanggal 15 Januari 2020.
- Chotimah, Hidayat Chusnul. 2016. "Identitas Nasional dan Normalitas Internasional sebagai Pertimbangan politik Indonesia dalam Merespon Saksi dan Jaringan Terorisme Global. *Jurnal Politica*". Vol. 7.
- Chusniyah, Tutut. 2016. Pengaruh Identitas Nasional, Etnis, dan Agama Terhadap Multikulturalisme dalam Menghadapi Globalisasi di Indonesia. [Http://fppi.um.ac.id](http://fppi.um.ac.id). Vol.8, No.2. Diakses pada tanggal 18 Mei pukul 15.34
- Fikri, M. Sirajudin, Nico Oktario A. "Politik Identitas dan Penguatan Demokrasi Lokal (Kekuatan Wong Kito dalam Demokrasi Lokal. *Jurnal Kebudayaan dan Sastra Islam*". Vol. 1053
- Hanifiya. 2018. "Politik Identitas dan Representasi Politik. *Jurnal Studi Agama-Agama*" Vol. 1.
- Habibi, Muhammad. 2019. "Analisis Politik Di kesenpatan. Akan tetapi target para pelaku lokal telah di anggap hanya menjadi naluri untuk memimpin suatu kelompok demi mencapai tujuan ekonomi, politik. Yang menjelaskan bahwa desentralisasi merupakan faktor penentu munculnya suatu politik identitas dengan besarnya kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat ke daerah di era reformasi membuat mantapnya kedudukan pelaku lokal atas kekuasaan di arena politik lokal. Praktek politik didesentralisasi mendajikan berita etnisitas, suku, agama, dan golongan sebagai politik dalam meraih kekuasaan. Politik identitas di pengaruhi oleh faktor struktural, dimensi politik utamanya, ketidaksinambungan politik dan etnis.
- Indonesia". *Jurnal Sosial Politik Universitas Mulawarman*.
- Lestari, Yeni Sri. 2018. "Politik Identitas di Indonesia: Antara Nasionalisme dan Agama". *Jurnal Of Politics and Policy*. Vol. 1.
- Sari, Endang. 2016. "Kebangkitan Politik Identitas Islam pada Arena Pemilihan Gubernur Jakarta. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*." Vol. 7.
- Sri Astuti Buchari. 2014. "Kebangkitan Etnis Menuju Politik Identitas". Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kurniawan, Budi. 2018. "Politisasi Agama di Tahun Politik: Politik PascaKebenaran di Indonesia dan Ancaman bagi Demokrasi." *Jurnal Sosiologi Agama*. Vol. 12.
- Kontona, Saradi dkk. 2018. "Praktik Politik Identitas dalam Dinamika Politik Lokal Masyarakat. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*". Vol. 6.
- Sukamto, 2010. *Politik Identitas (Suatu Kajian Awal dalam Kerangka dan interaksi "Lokalitas dan Globalisasi")*. *Jurnal Sejarah dan Budaya Universitas Malang*. Vol.2
- Zahrotunnimah. 2018. *Sejarah Politik Identitas dan Nasionalisme di Indonesia*. Vol. 2.